

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini mendeskripsikan tentang wujud satire dan karakteristik satire, wujud satire yakni menertawakan, menolak dan mengkritik pada ujaran Nurhadi Aldo yang dipublikasikan dalam akun media sosial Instagram. Penelitian ini juga menjelaskan karakteristik satire yang ada dalam ujaran Nurhadi Aldo, karakteristik ini antara lain *In concreli, distortion, contrast, inderection, dan surprise*. Dalam penelitian ini hanya mengambil dua karakteristik yakni *contras dan inderections*. Penelitian ini diambil selama 4 bulan, dimulai pada bulan Desember 2018 – Maret 2019.

Berikut data yang merupakan wujud satire dan karakteristik dari Instagram Nurhadi Aldo.

Cara penulisan kodefikasi data adalah sebagai berikut:

CNT	→ Karakteristik satire Contras
IDR	→ Karakteristik satire Inderections
MNT	→ Wujud Menertawakan
MNL	→ Wujud Menolak
MNK	→ Wujud Mengkritik
Tgl-Bln-Thn	→ Waktu Unduh
1,2,3 dst	→ Kode Urut Data

Data Ujaran Nurhadi Aldo dalam Kategori Wujud Satire

1. Kesejahteraan petani dan buruh adalah tolak ukur kemajuan niggeri (MNK/24-12-18/1)
2. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak mengolok-olokkan kata “Assalamualaikum” menjadi “samlekom”(MNK/25-12-18/2)
3. Democrazy adalah tempat bersuara bagi orang-orang kaya (MNK/28-12-18/3)
4. Jika Karl Marx memimpikan tatanan masyarakat tanpa kelas lalu dimana kita akan belajar(MNL/29-12-18/4)

5. Negara menciptakan sistem dimana uang adalah sang penguasa sebenarnya. (MNL/01-01-18/5)
6. Isu PKI dan isu kepercayaan radikal merupakan manuver politik kelas penguasa dalam menarik simpati dan dukungan massa(MNK/02-01-19/6)
7. Aparat dalam negeri akan menjadi petani PNS gol AB (MNK/05-01-19/7)
8. Partai sebelah berani menolak pologami, tapi ga berani membawa isu LGBT apalagi kami(MNL/06-01-19/8)
9. Politikus mengadu domba rakyat menggunakan media massa besar-besaran (MNK/09-01-19/9)
10. Jika mereka yang memecah belah kesatuan demi sebuah kekuasaan kalian sebut sebagai orang berpendidikan, maka kami lebih suka menjadi orang-orang dungu yang gemar menikmati humor berbau porno(MNK/10-01-19/10)
11. Politik itu memang sampah, tapi meninggalkan teman hanya karena berbeda pandangan politik itu lebih rendah dari sampah(MNK/30-01-19/11)
12. Saya tidak setuju bila masalah perpecahan pelempan berujung damai tanpa baku hantam dan keadilan bagi korban(MNL/07-02-19/12)
13. Valentine bukan budaya kita, budaya kita adalah mengintimidasi orang yang berbeda pilihan(MNK/13-02-19/13)
14. menjadikan lahan rakyat sebagai investasi rakyat kepada perusahaan adalah solusi untuk konflik agraria(MNL/22-02-19/14)
15. Hukum tidak selamanya adil, tetapi keadilan sudah pasti adil(MNK/17-13-19/15)

Data Ujaran Nurhadi Aldo dalam Kategori Karakteristik Satire

1. Mari kita bongkar rakyat miskin mana yang mampu membayar 80 juta(CNT/10-01-19/1)
2. Tetaplah jadi rakyat yang goblok, supaya kami terlihat pintar (CNT/15-01-19/2)
3. Prostitusi tidak akan ada lagi di Indonesia, karena rajyat sejahtera(CNT/01-03-19/3)
4. Saya tidak pernah melihat orang-orang berdasi mengaduk semen dan ngecor (IDR/22-01-19/4)

5. Saya tidak pernah melihat ada masyarakat MissQueen yang tinggal di istana negara dan gedung-gedung milik politikus (IDR/28-01-19/5)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Wujud Satire

4.2.1.1 Mengkritik

Wujud satire kritikan mengandung kritik mengenai kelemahan manusia yang dianggap sesuatu yang tidak berharga dengan tujuan diadakan perbaikan, jadi sebuah kritikan diharapkan menghasilkan sesuatu yang lebih positif.

Berikut adalah ujaran Nurhadi-Aldo yang mengandung wujud satire mengkritik sebagai berikut:



Kesejahteraan petani dan buruh adalah tolak ukur kemajuan niggeri

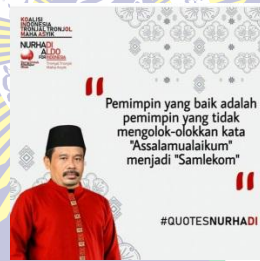
MNK/24-02-12/1

Data yang berkode MNK/24-12-18/1 bermaksud mengkritik pemerintah karena ujaran Nurhadi Aldo bertujuan untuk mengkritik kondisi perkembangan bangsa saat ini. Ujaran tersebut mengandung bentuk terhadap kekuasaan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah mengenai kesejahteraan buruh dan petani di negara ini. Hal tersebut dilihat berdasarkan fenomena yang sering dilihat dari kondisi ini bahwa buruh dan petani harus tunduk, patuh terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mempunyai tujuan untuk menyejahterakan rakyat, namun terkadang pelaksanaan kebijakan dari pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Seperti distribusi subsidi yang tidak sampai ke tangan petani. Hal ini juga diungkapkan oleh Moeldoko yakni Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang mengatakan

bahwa subsidi yang diberikan pemerintah kepada petani dirasa kurang maksimal, bahkan banyak yang tidak sampai ke tangan petani.

(<http://www.matanurani.com/news/nasional/hkti-keluhkan-distribusi-subsidi/2017/07/29/>)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Januari 2019 penghasilan buruh saat ini hanya berkisar Rp.53.604 per hari. Pemerintah masih lemah dalam memegang kesejahteraan rakyat, petani sebagai kaum marginal atau kaum bawah harusnya lebih mendapat perhatian dari pemerintah. Kemajuan negeri dapat dilihat dari kemakmuran petani dan buruh, jika petani dan buruh keadaan mereka belum sejahtera maka dapat dikatakan pemerintahan di Indonesia kurang baik, sebaliknya jika petani dan buruh sejahtera maka pemerintahan dianggap sukses dalam menjalankan tugasnya. Kata *niggeri* dalam ujaran tersebut hanya berupa plesetan yang sebenarnya memiliki makna negeri.



Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak mengolok-olokkan kata “Assalamualaikum” menjadi “samlekom”

MNK/25-12-18/2

Ujaran yang berkode MNK/25-12-18/, ujaran tersebut bertujuan mengkritik pemimpin atau seseorang yang mempunyai kuasa agar lebih dapat menghargai orang lain dengan tidak merendahkan agamanya, harusnya pemimpin yang baik dapat memberikan contoh yang baik untuk bisa bertoleransi dengan agama yang lain. Ujaran tersebut memiliki maksud bahwa pemimpin ada yang memahami agama dengan benar dan ada pemimpin yang kurang memahami tentang agama. Seharusnya

pemimpin tahu akan kebenaran syariat Islam. Hal ini berkaitan dengan yang dikatakan oleh politikus Nasdem, Effendi Choiri. Saat presiden dalam mengawali pidatonya dengan mengucapkan salam secara fasih Effendi menyindir tokoh politik nasional yang tidak bisa mengucapkan salam secara benar.

(<http://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-fasih-bahasa-arab-gus-choi-nyeletuk-sindir-prabowo.html>)

Assalamualaikum dalam Islam digunakan untuk mengucapkan salam dengan sesama muslim, kata assalamualaikum tidak bisa dirubah menjadi samlekom karena jika tidak diucapkan dengan benar maknanya tidak lagi sama.



Democracy adalah tempat bersuara bagi orang-orang kaya

MNK/28-12-18/3

Ujaran yang berkode MNK/28-12-18/3 mengandung wujud satire mengkritik pemerintah yang menuntut adanya kesetaraan tanpa mendominasi pihak tertentu, dimana seringkali orang-orang kaya mendapatkan perlakuan yang istimewa. Orang kaya mempunyai alat untuk dapat menyuarakan pendapatnya kepada pemerintah, sedangkan rakyat kecil hanya dapat tunduk dengan keputusan pemerintah yang tidak menghiraukan suaranya. Hal ini termasuk dalam bentuk kekuasaan yang dapat digenggam oleh sekelompok masyarakat tertentu. *Democracy* memiliki makna bahwa sebenarnya demokrasi yang tujuannya mengutamakan persamaan hak dan mengharapkan perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan. Kata demokrasi di plesetkan menjadi kata *democracy* dengan karena pada dasarnya Indonesia termasuk negara demokrasi yang rakyatnya ikut andil dalam menjalankan pemerintahan melalui wakil

rakyat, tetapi pada kenyataannya kebebasan dan suara rakyat tidak dihiraukan. Hal ini juga diungkapkan oleh Syarwan Hamid selaku Ketua Koalisi Umat Madani yang menyatakan “pemerintahan itu budek, suara rakyat tidak pernah didengarkan” saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi dukungan pada Amien Rais

(<http://www.cnnindonesia/20180630181422-32-310407/usung-amien-rais-jadi-capres-kum-sebut-pemerintah-budek>). kata *Democracy* untuk mengkritik pemerintah agar suara rakyat juga diperhatikan.



Isu PKI dan isu kepercayaan radikal merupakan manuver politik kelas penguasa dalam menarik simpati dan dukungan massa.

MNK/02-01-19/6

Data yang berkode MNK/02-01-19-6 mengandung karakteristik mengkritik, ujaran tersebut mengkritik para penguasa atau politis agar lebih bersikap dewasa, hanya demi kekuasaan untuk menarik simpati para penguasa menebar isu-isu yang tidak benar. Isu adanya PKI dan kepercayaan radikal atau bertentangan dengan norma menjadi salah satu gerakan cepat untuk menarik simpati dari golongan religius. Melalui isu PKI para politikus dengan mudah memprovokasi masyarakat. Ujaran tersebut mengandung unsur kekuasaan yang dibentuk oleh para politikus dalam membentuk sebuah strategi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI memberikan pernyataan bahwa kebangkitan PKI hanyalah sebatas rumor, tidak jelas nyata, itu hanyalah isu untuk kepentingan kelompok tertentu saja (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181015154216-32->

338596/lemhannas-pki-jadi-isu-musiman-untuk-kepentingan-politik).

Mayoritas Indonesia beragama Islam dan umat islam menjadi sasaran yang bagus untuk para politikus, umat islam menolak dengan tegas adanya PKI, karena islam menjadi agama yang mayoritas di Indonesia para politikus menebar isu PKI dan kepercayaan radikal untuk tujuan mengharapkan dukungan dari umat Islam.



Aparat dalam negeri akan menjadi petani PNS gol AB

MNK/05-01-19/7

Ujaran tersebut masuk dalam wujud satire mengkritik pemerintah dalam bentuk ketenagakerjaan. PNS begitu diimpikan setiap orang, begitu juga petani yang menginginkan menjadi PNS. petani berharap kepada pemerintah jika nasibnya sebagai petani ingin menjadi lebih baik, saat ini profesi petani masih diposisi yang rendah, padahal petani yang selama ini memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Petani berharap pemerintah dapat melihat kerja keras petani. Petani ingin menjadi PNS karena PNS kehidupannya terjamin, sedangkan petani hanya mengandalkan hasil panennya dan hanya dapat mengikuti kebijakan pemerintah. Golongan AB merupakan bentuk guyonan, yang dimaksud bukan golongan darah melainkan golongan untuk para PNS.

Seperti yang terkait pada berita tentang Presiden yang akan mengangkat penyuluh petani menjadi PNS. Penyuluh petani bertugas untuk memberikan pendampingan dan pelatihan untuk para petani.

Perannya sangat penting bagi petani karena hal itu mereka pantas diangkat sebagai PNS yang telah memberikan pengabdian kepada negara. Komisi IX DPR yang menyangkut keuangan negara juga mendukung pemerintah untuk segera menyetujui pengangkatan penyuluh petani menjadi PNS. (<http://www.tribunnews.com//nasional/2014/02/12/penyuluh-pertanian-ingin-diangkat-jadi-pns>).

Ujaran tersebut mengandung unsur kekuasaan di mana kekuasaan tersebut memanfaatkan jabatan atau profesinya sebagai alat untuk kepentingan dirinya sendiri dan merugikan negara.



Politikus mengadu domba rakyat menggunakan media massa besar-besaran

MNK/09-01-19-/9

Data tersebut bertujuan untuk mengkritik politikus yang tidak bertanggungjawab dalam penggunaan media sosial. Politikus mengadu domba rakyat dengan berbagai cara seperti memfitnah, mengujar kebencian melalui media sosial untuk mencari simpati. Media massa dapat dijadikan sebagai ajang kampanye yang positif dalam berpolitik, namun banyak juga dijadikan sebagai ajang caci maki dan saling hujat. Sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab menggunakannya untuk memprovokasi dan mengujar kebencian terhadap kelompok lain melalui media. Tujuannya untuk mengadu domba masyarakat yang akhirnya menimbulkan permusuhan. Kelompok yang terpengaruh dengan mudah dikuasai oleh politikus. Ujaran tersebut mengandung unsur kekuasaan

yang dimiliki oleh para politikus untuk mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan media massa sebagai senjatanya.

Menjelang pemilihan presiden, pada 23 Oktober 2018 di Tangerang, Jokowi memberikan pernyataan bahwa untuk memperoleh simpati para politikus memakai segala cara, termasuk cara yang tidak baik. Masih ada yang menggunakan politik adu domba, politik kebencian dan masih banyak cara lain yang tidak baik yang digunakan oleh para politikus untuk menarik simpati dari masyarakat.

[\(http://nasional.tempo.co/read/1139425/soal-politikus-sontoloyo-jokowi-cari-simpat-pakai-adu-domba/\)](http://nasional.tempo.co/read/1139425/soal-politikus-sontoloyo-jokowi-cari-simpat-pakai-adu-domba/)



Jika mereka yang memecah belah kesatuan demi sebuah kekuasaan kalian sebut sebagai orang berpendidikan, maka kami lebih suka menjadi orang-orang dungu yang gemar menikmati humor berbau porno.

MNK/10-01-19/10

Data yang berkode MNK/10-01-19/10 bermaksud mengkritik orang yang berpindidikan tetapi tidak dapat menjaga kesatuan di negaranya. Tidak semua orang yang berpendidikan mampu menyatukan bangsa ada sebagian yang ingin memecah belah kesatuan bangsa yang mementingkan diri sendiri. Masyarakat hanya berdiam diri seperti orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa melihat kelucuan orang berpendidikan yang ingin memcelah belah kesatuan hanya untuk kepentingan individu untuk mendapatkan kekuasaan. Seharusnya orang yang berpendidikan mampu mencerdaskan bangsanya untuk menjaga kesatuan bangsa tanpa adanya perselisihan. Ujaran tersebut mengandung unsur kekuasaan, di mana orang berpendidikan mempunyai pengetahuan ataupun pengalaman yang banyak

harusnya bisa menjaga keutuhan bangsa namun sebaliknya orang berpendidikan tidak menggunakan pengetahuannya dengan benar hanya untuk kepentingan pribadinya agar dapat mendapatkan kekuasaan.



Politik itu memang sampah, tapi meninggalkan teman hanya karena berbeda pandangan politik itu lebih rendah dari sampah

MNK/30-01-19/11

Data yang berkode MNK/30-01-19/11 bermaksud untuk mengkritik orang-orang yang tidak bisa menghargai pilihan orang lain. Suasana politik yang memanas menjadikan perdebatan pada kelompok yang berbeda pilihan. Politik itu sampah yang mengatas namakan rakyat hanya untuk kepentingan suatu kekuasaan, tipu menipu dengan menebar janji palsu.

Dalam pemberitaan di Kompasiana menuliskan jika politik itu tak ubahnya seperti sampah, para penguasa hanya sibuk dengan mencitrakan diri, para politik tidak akan mau bekerja sama jika itu tidak menguntungkan bagi kelompoknya.

(<http://www.kompasiana.com/lyon/552e57a06ea8349d4d8b4576/politik-itu-sampah>)

Politik merupakan konspirasi, di mana teman bisa dijadikan lawan dan lawan bisa dijadikan teman, itu juga masuk dalam permainan politik. Politik sudah meracuni pikiran seseorang sehingga pertemanan pun bisa terputus hanya karena berbeda prinsip. Berbeda pilihan itu wajar hanya perlu saling menghargai pilihannya masing-masing, tanpa memutus tali persaudaraan dengan teman.



Valentine bukan budaya kita, budaya kita adalah mengintimidasi orang yang berbeda pilihan (MNK/13-02-19/13)

MNK/13-12-19/13

Data tersebut bermaksud mengkritik tentang perbedaan prinsip terhadap setiap individu yang berbeda pilihan. Setiap orang mempunyai kebebasan hak dalam memilih, tidak boleh ada unsur intimidasi dalam bentuk apapun untuk mempengaruhi seseorang dalam memilih, namun dalam kenyataannya mengintimidasi orang yang berbeda pilihan sudah menjadi budaya, dimana ini merupakan kejahatan terhadap hak kebebasan yang sudah dimiliki oleh setiap individu, harusnya sudah tidak adalagi intimidasi karena setiap individu memiliki kebebasan sebagai haknya untuk memilih. Ujaran tersebut mengandung unsur kajian kebudayaan tentang kekuasaan, budaya politik dalam mengintimidasi seseorang untuk kebebasan hak dalam hal memilih dan hal tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan.

Di kutip dari Kompas tentang intimidasi. Jumat, 29/06/2018 Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Pengumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mengatakan bahwa tidak ada yang boleh melakukan intimidasi ataupun kejahatan dalam bentuk apapun terhadap hak kebebasan untuk memilih untuk mempengaruhi seseorang.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/29/20331841/perludem-intimidasi-seseorang-dalam-memilih-paslon-itu-kejahatan-terhadap>



Hukum tidak selamanya adil, tetapi keadilan sudah pasti adil.

MNK/17-13-19/15

Data yang berkode MNK/17-13-19/15 bermaksud mengkritik tentang penegakan hukum saat ini. Hukum tidak selamanya adil karena hukum yang selama ini menjadi jalur untuk mendapatkan keadilan justru dapat di perjualbelikan. Keputusan hukum dapat dibelokkan, permainan hukum dapat menghapus keadilan yang sesungguhnya, banyak penegak hukum yang tidak dapat menegakkan keadilan dengan benar. Keadilan yang sebenarnya ialah apa yang telah diperbuat juga setimpal dengan hukuman yang akan diterima. Hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah agar aparat penegak hukum lebih tegas dan adil dalam menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Ujaran tersebut mengandung bentuk terhadap sistem pemerintahan yang kurang tegas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Banyak kasus yang serupa dengan pemaparan tersebut, seperti salah satu contohnya, yaitu kasus Gayus Tambunan. Gayus Haloman atau yang biasa disebut Gayus Tambunan, mantan Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan Indonesia yang tersandung kasus hukum karena korupsi, penggelapan dan pencucian uang, sehingga divonis oleh Mahkamah Agung dengan kurungan 28 tahun di penjara. Gayus menjadi sorotan publik karena pada masa hukumannya Gayus nampak masih dapat menghirup udara bebas di luar dan tidak ada dibalik jeruji besi. Gayus juga sempat berada di Bali dan Malaysia yang seharusnya dia berada di penjara.

(<http://jabar.tribunnews.com/2018/01/27/masih-ingat-gayus-tambunan-si-mafia-pajak-begini-kabarnya-sekarang>)

4.2.1.2 Menolak

Menolak diartikan sebagai sebuah penolakan atau tidak sependapat dengan suatu hal atau situasi.

Berikut adalah ujaran Nurhadi Aldo yang mengandung karakteristik menolak.



Jika Karl Marx memimpikan tatanan masyarakat tanpa kelas lalu dimana kita akan belajar

MNL/29-12-18/4

Data tersebut mengandung wujud menolak. Ujaran tersebut menolak adanya kelas sosial. Nurhadi Aldo beranggapan bahwa teorinya Karl Marx itu tepat jika digunakan untuk menyindir bangsa Indonesia. Marx memimpikan tatanan tanpa kelas, hal ini ingin diterapkan di Indonesia, namun pada kenyataannya Indonesia belum bisa menerapkannya. Adanya kelas sosial yang ada dalam masyarakat yang hanya menimbulkan adanya perbedaan dan seharusnya negara lebih bersikap netral dan bijak dengan tidak memihak pada kelas tertentu saja. Kelas yang dimaksud disini bukan kelas untuk tempat belajar mengajar melainkan kelas sosial yang ada dalam masyarakat, dalam ujaran Nurhadi Aldo menyinggung jika di Indonesia masih ada kelas sosial di masyarakat, seperti adanya orang miskin dan orang kaya.



Negara menciptakan sistem dimana uang adalah sang penguasa sebenarnya.

MNL/01-01-18/5

Ujaran yang berkode MNL/01-01-19/5 masuk dalam wujud menolak, tidak setuju jika uang dijadikan sebagai penguasa di negara ini, masih ada hukum maupun aturan yang harus dipatuhi. Ujaran tersebut memiliki makna bahwa uang tidak dapat dijadikan sebagai penguasa atau yang mengatur segalanya, sang penguasa yang dimaksud dalam ujaran tersebut yakni uang di nomor satukan, bahkan segala hal dapat diatur dengan uang, seperti masalah pekerjaan, hukum dapat diperjualbelikan, Semua dapat dikendalikan dengan uang. Banyak kasus yang serupa dengan pemaparan tersebut. Ujaran tersebut mengandung bentuk terhadap kekuasaan, di mana kekuasaan dapat diatur dengan uang dengan menyampingkan aturan maupun hukum yang sudah ada.

seperti salah satu contohnya, yaitu kasus jual beli jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Jambi, Kepala Sub Bagian Pengangkatan Badan Kepegawaian Daerah ditangkap dengan dugaan suap tes CPNS dengan membayar uang Rp.100 juta untuk bisa menjadi PNS. dari berita tersebut dapat disimpulkan jika ingin menjadi PNS, profesi tersebut dapat dibeli dengan uang bukan karena murni dari kemampuannya. (<https://www.inews.id/daerah/region/suap-cpns-terungkap-oknum-bkd-muaro-jambi-minta-rp100-juta-ke-korban/413413>)



Partai sebelah berani menolak pologami, tapi ga berani membawa isu LGBT apalagi kami.

MNL/06-01-19/8

Ujaran berkode MNL/06-01-19/8 memiliki makna bahwa ada partai yang menolak adanya poligami, padahal dalam islam poligami diperbolehkan dan mereka berani menyuarakan pernyataan tersebut. yang diharamkan yakni LGBT menyukai sesama jenis yang sudah jelas dilarang. Tidak ada yang berani membicarakan persoalan tentang perlindungan kaum LGBT bahkan partai nasionalis juga tidak berani menyinggung isu ini karena akan membuat mereka kehilangan suara. Ujaran tersebut mengandung bentuk unsur kekuasaan. Partai yang berani menolak adanya poligami karena partai tersebut mempunyai kekuasaan sehingga berani menyatakan pernyataan tersebut.

Salah satu partai di Indonesia yang berani menolak poligami adalah PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Grace Natalie yakni ketua umum PSI melarang kader dan calegnya melakukan poligami. Dari hal tersebut beberapa caleg dan kader mundur dari PSI karena larangan berpoligami. Alasan anti poligami karena mereka mempunyai prinsip ingin memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

(<http://makassar.tribunnews.com/2018/12/19/sedang-ramai-isu-psi-tolak-poligami-penjelasan-ustadz-abdul-somad-tentang-istri-lebih-satu>)

Ujaran tersebut masuk dalam wujud satire menolak, banyak yang tidak setuju jika poligami diharamkan. seseorang bebas menyuarakan haknya tetapi tidak dengan menyalahi aturan agama. justru yang harus

menjadi perhatian pemerintah yakni LGBT yang semakin marak di Indonesia.



Saya tidak setuju bila masalah pelecehan perempuan berujung damai tanpa baku hantam dan keadilan bagi korban

MNL/07-0-19/11

Data yang berkode MNL/07-0-19/11 mengandung wujud satire menolak. Saya tidak setuju bila masalah pelecehan perempuan berujung damai, pelecehan merupakan bentuk plesetan dari kata pelecehan perempuan. Ujaran tersebut bermaksud menolak karena tidak adanya keadilan untuk masalah pelecehan perempuan. Seringkali hukum tidak berpihak pada perempuan. Harga diri perempuan diadili dengan kedamaian, keputusan pengadilan masih melitinkan adanya diskriminatif terhadap perempuan, belum ada aturan hukum khusus untuk pelecehan perempuan. Hal ini yang menjadikan kasus pelecehan perempuan semakin meningkat. Para penegak hukum hanya tunduk pada orang yang tidak toleran terhadap perempuan. Ujaran tersebut mengandung unsur kekuasaan, di mana seseorang yang tidak memegang kekuasaan hanya dapat patuh terhadap keputusannya.

Seperti tidak adanya keadilan pada kasus Baiq Nuril seorang guru yang mengalami pelecehan perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali terhadap Nuril, sehingga Nuril berjuang untuk memperoleh keadilan dari Presiden Jokowi. Komisioner Komnas Perempuan, Indriyati Suparno mengatakan “tidak adanya keadilan untuk kasus Nuril, putusan hukum mengabaikan

keadilan untuk perempuan dan ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.

(<http://makassar.tribunnews.com/2019/07/17/kronologi-kasus-baiq-nuril-berjuang-peroleh-keadilan-dari-presiden-jokowi-suratnya-haru-dan-viral>).



Menjadikan lahan rakyat sebagai investasi rakyat kepada perusahaan adalah solusi untuk konflik agraria.

MNL/22-02-19/14

Data tersebut mengandung satire menolak. Ujaran menjadikan lahan rakyat sebagai investasi rakyat kepada perusahaan tersebut bermaksud untuk menolak jika lahan milik rakyat dijadikan sebagai investasi kepada perusahaan. Pemerintah dan perusahaan akan semena-mena menggunakan lahan rakyat untuk kepentingannya tanpa memperhatikan kondisi masyarakat sekitar dan itu akan merugikan rakyat. Keadilan atas hak tanah belum terwujudkan, seperti contoh sawah petani yang digunakan sebagai investasi, petani akan kehilangan pekerjaannya yang sehari-hari mengolah sawahnya dan tidak akan bisa membeli sawahnya kembali karena harga tanah semakin naik, para petani akan kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. Hal ini bukan menjadi solusi untuk konflik agraria selama ini.

Jokowi menyampaikan bahwa konflik agraria masih terjadi di semua provinsi, pemerintah masih terus berusaha untuk menyelesaikannya dengan membagikan sertifikat tanah, menurut Jokowi cara ini dapat mengurangi konflik sengketa lahan selama ini.

<http://nasional.kompas.com/read/2019/02/18/15103871/data-menunjukkan-konflik-agraria-masih-marak-ini-kata-jokowi.18-02-19>

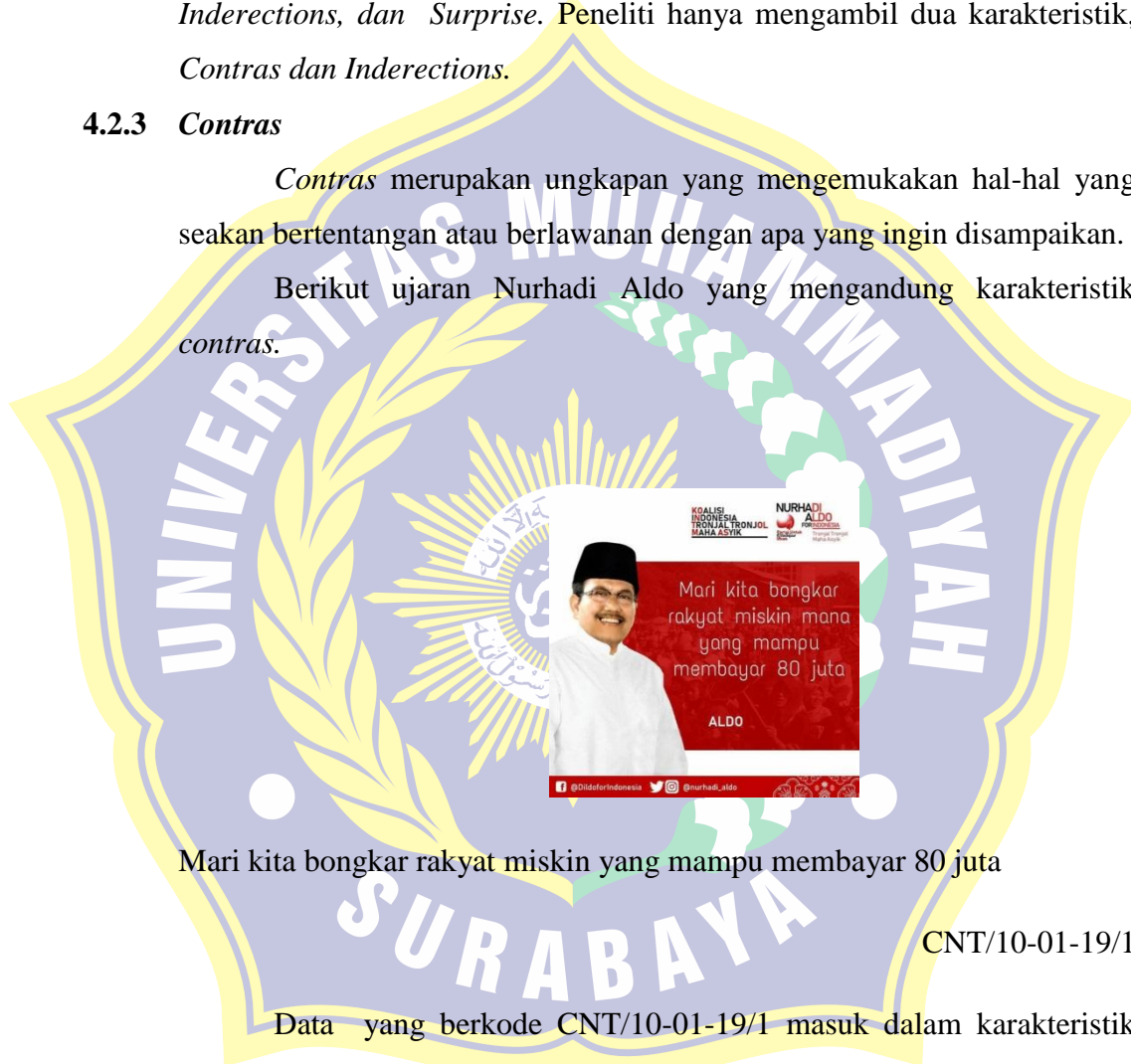
4.2.2 Karakteristik Satire

Helller (dalam Wadipalapa, 2014:316) memberikan pendapat bahwa ada lima karakteristik satire yakni *In concreli*, *Distortion*, *Contras*, *Inderrections*, dan *Surprise*. Peneliti hanya mengambil dua karakteristik, *Contras* dan *Inderrections*.

4.2.3 *Contras*

Contras merupakan ungkapan yang mengemukakan hal-hal yang seakan bertentangan atau berlawanan dengan apa yang ingin disampaikan.

Berikut ujaran Nurhadi Aldo yang mengandung karakteristik *contras*.



Mari kita bongkar rakyat miskin yang mampu membayar 80 juta

CNT/10-01-19/1

Data yang berkode CNT/10-01-19/1 masuk dalam karakteristik *contras* karena ujaran yang diucapkan bertentangan dengan apa yang ingin disampaikan. Rakyat miskin yang mampu membayar 80 juta, dari ujaran tersebut tidak mungkin rakyat miskin mampu mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak bahkan untuk makan pun seadanya. Tujuan nurhadi aldo membuat ujaran ini yakni ingin mengungkap pihak yang menggunakan jasa prostitusi online ini dan jaringan prostitusi online itu sendiri, karena merasa pemberitaan di media sosial hanya mengeksploitasi

dari sisi perempuan, harusnya para pengguna jasa prostitusi juga diberikan sanksi agar merasa jera dengan yang diperbuat.

hal ini terkait dengan kasus salah satu artis yakni VA yang tersandung masalah prostitusi online. pemberitaan di media sosial seringkali mengeksploitasi VA. Edi Santoso sebagai pakar Komunikasi dari Universitas Jenderal Soedirman mengatakan bahwa seharusnya pemberitaan prostitusi tidak hanya menyudutkan perempuan saja tetapi orang-orang yang menggunakan jasa itu dan jaringan prostitusi yang harusnya di perhatikan.

(<http://www.cnnindonesia.com.nasional/20190108135213-12359283/pemberitaan-prostitusi-dinilai-kerap-menyudutkan-perempuan>)



Tetaplah jadi rakyat yang goblok, supaya kami bisa terlihat pintar.

CNT/15-01-19/2

Data yang berkode CNT/15-01-19/2 mengandung karakteristik *contras*, ujaran ini bertentangan dengan maksud yang ingin disampaikan, Tetaplah jadi rakyat yang goblok, yang dimaksud rakyat jangan hanya diam ketika melihat para politikus maupun pemerintahan melakukan kesalahan, ketika rakyat diam para politikus akan semakin merasa berkuasa. Rakyat Indonesia bukannya bodoh tetapi dibodohi oleh para elit politikus yang berkepentingan dalam kekuasaan.

Prabowo juga mengatakannya pada Selasa, 10 Juni 2014 dalam acara deklarasi persatuan perangkat desa Indonesia di Rumah Polonia, Jakarta.

Prabowo mengatakan bahwa jangan terlalu lugu menjadi rakyat Indonesia, lugu yang dimaksud Prabowo merupakan singkatan lucu dan *guoblok*.

(<http://nasional.kompas.com/read/2014/06/27/1911432/Prabowo.Mau.Tidak.Rakyat.Indonesia.Dikatakan.Bodoh>)



Prostitusi tidak akan ada lagi di Indonesia, karena rakyat sejahtera

CNT/01-03-19/3

Data yang berkode CNT/01-03-19/3 mengandung karakteristik satire *contras*, karena maknanya berlawanan dengan ujarannya. Di Indonesia praktik prostitusi semakin marak. Bagaimana prostitusi tidak akan lagi ada di Indonesia jika rakyatnya saja belum sejahtera dan masih kesulitan dalam mencari pekerjaan. Akal pikiran dari individu itu sendiri dan masalah ekonomi menjadi salah satu penyebabnya, sulitnya mencari pekerjaan dan tingginya kebutuhan membuat seseorang dapat terjun di dunia prostitusi. Dalam hal ini diharapkan hukum lebih tegas dalam menangani prostitusi yang sudah jelas tidak diperbolehkan oleh agama.

4.2.4 Inderections.

Berikut ujaran Nurhadi Aldo yang mengandung karakteristik Inderections.



Saya tidak pernah melihat orang-orang berdasi mengaduk semen dan ngecor

IDR/22-01-19/4

Data yang berkode IDR/22-01-19/4 mengandung karakteristik satire *inderections* karena ujaran tersebut bermaksud membandingkan jika pekerja kantoran tidak pernah melakukan pekerjaan seperti buruh.

Pekerjaan buruh seharusnya diapresiasi oleh pemerintah, tidak ada pembangunan yang didalamnya tidak melibatkan buruh. Upah yang didapatkan buruh tidak sebanding dengan kerja kerasnya, sedangkan pekerja kantoran hanya mau menyuruh-nyuru saja dan tidak akan mau bekerja seperti seorang buruh. Pekerja kantoran mendapatkan pekerjaan dan upah yang terjamim sedangkan pekerjaan buruh tidak menentu dengan upah yang tidak sebanding dengan pekerjaannya yang keras.



Saya tidak pernah melihat ada masyarakat MissQueen yang tinggal di istana negara dan gedung-gedung milik politikus.

IDR/28-01-19/5

Data yang berkode IDR/28-01-19/5 mengandung karakteristik satire *Inderections* karena pada ujaran tersebut membandingkan mengenai rakyat miskin yang tidak akan berkedudukan dengan para politis yang ada di istana, keinginan ataupun harapan dari rakyat kecil seringkali tidak diterima oleh pemerintah karena menganggap bahwa hanya para politis saja yang berhak bersuara dan apapun keputusan dari pemerintah rakyat kecil tidak bisa memprotesnya. Seperti yang dikatakan ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Albertus Patty, bahwa Indonesia dibangun oleh pemerintah dan rakyatnya, indonesia tidak bisa dibangun sendiri oleh

pemerintah. Albertus juga memberikan saran kepada pemerintah agar mendengarkan suara rakyatnya

(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/08/17/ou2v384-pgi-pemerintah-harus-mendengarkan-suara-rakyat>).

Para elit politikus hanyalah memberikan citra kepada masyarakat miskin bahwa politikus mampu memberantas kemiskinan namun sebenarnya mereka lah yang memepertahkannya.

